

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN TABUNGAN
PAKET LEBARAN PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I
(Studi Kasus Di Dusun XXII Pondok Rawa Sampali Kecamatan
Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Syari'ah pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

OLEH

LULU ELVIRAYANI
NIM. 24.15.3.070



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M/1441 H**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN TABUNGAN
PAKET LEBARAN PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I
(Studi Kasus Di Dusun XXII Pondok Rawa Sampali Kecamatan
Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)**

SKRIPSI

OLEH

**LULU ELVIRAYANI
NIM. 24.15.3.070**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M/1441 H**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN TABUNGAN
PAKET LEBARAN PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I
(Studi Kasus Di Dusun XXII Pondok Rawa Sampali Kecamatan
Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)**

Oleh:

LULU ELVIRAYANI
NIM: 24.15.3.070

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag
NIP.19591915 199703 2 001

Dra. Sahliah, M.Ag
NIP. 19630413 199803 2 001

Mengetahui:
Ketua Jurusan Muamalah,
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN-SU Medan

Fatimah Zahara, MA
NIP. 19730208 199903 2 001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN TABUNGAN PAKET LEBARAN PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I (Studi Kasus Di Dusun XXII Pondok Rawa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 14 Februari 2020.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam ilmu Syari'ah pada Jurusan Mu'amalah.

Ketua,

Medan, 14 Februari 2020
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan
Sekretaris,

Fatimah Zahara, MA
NIP. 19730208 199903 2 001
Anggota-anggota

Tetty Marlina Tarigan, M.Kn
NIP. 19770127 200710 2 002

Dra. Hj. Tjek Tanti, MA
NIP. 19550201 199203 2 001

Tetty Marlina Tarigan, M.Kn
NIP. 19770127 200710 2 002

Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag
NIP. 19591915 199703 2 001

Dra. Sahliah, M.Ag
NIP. 19630413 199803 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Dr. Zulham, S.HI., M.Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lulu Elvirayani

NIM : 24.15.3.070

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

JudulSkripsi : **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN
TABUNGAN PAKET LEBARAN PERSPEKTIF
MAZHAB SYAFI’I (Studi Kasus Di Dusun XXII
Pondok Rawa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan
Kabupaten Deli Serdang)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah hasil karya saya, kecuali kutipan-kutipan di dalamnya yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 07 Februari 2020

Yang Membuat Pernyataan

Lulu Elvirayani
NIM.24.15.3.070

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN TABUNGAN PAKET LEBARAN PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI’I (Studi Kasus Di Dusun XXII Pondok Rawa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)”**. Tabungan paket lebaran adalah salah satu sistem jual beli cicilan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi pada saat lebaran. Pelaksanaan tabungan paket lebaran ini menggunakan akad jual beli (*bai’ istishna*). Pada akad *bai’ istishna* dalam tabungan paket lebaran ini terdapat beberapa ketentuan yang belum sesuai dengan hukum islam. Barang yang dijadikan tabungan paket lebaran merupakan barang yang mengalami fluktuasi harga. Selain itu, mengenai ukuran dan kualitas barang juga tidak dijelaskan. Masalah yang akan diteliti adalah bagaimana jual beli yang terdapat unsur gharar, bagaimana pelaksanaan tabungan paket lebaran di Dusun XXII Pondok Rawa Sampali dan apakah hukum dari pelaksanaan tersebut menurut mazhab syafi’i. Penelitian ini dilakukan di Dusun XXII Pondok Rawa Sampali. Penelitian ini merupakan penelitian gabungan antara penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Skripsi ini menggambarkan data yang diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan tipe penelitian *yuridis empiris* yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam masyarakat. Maka berdasarkan hasil penelitian, hukum pelaksanaan tabungan paket lebaran perspektif mazhab Syafi’i adalah tidak sah, karena di dalam tabungan paket lebaran belum sesuai dengan rukun dan syarat sahnya jual beli. Sebagaimana dalam pelaksanaannya tabungan paket lebaran terdapat unsur *gharar* di dalamnya.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb.

Segala puji hanya milik Allah yang telah memecahkan sumber-sumber hikmah dari hati orang-orang yang benar. Peneliti bersyukur kepada Allah dan memohon ampunan dari segala dosa dan semua amal. Shalawat dan salam kepada Nabi dan hamba-Nya yang mulia, Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, keturunan dan juga semua orang yang mencintainya. Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di Dusun XXII Pondok Rawa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang) sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Proses penyelesaian skripsi ini banyak mengalami berbagai rintangan, namun berkat taufik dan hidayah dan izin-Nya, beserta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan meskipun terdapat kekurangan baik dari segi penulisan maupun tata bahasanya. Semoga skripsi ini mampu membawa manfaat kepada para pembaca dan dapat menjadi

khazanah ilmu sebagai penambah referensi khususnya bagi Jurusan.

Keberhasilan peneliti tak luput atas dukungan orang-orang hebat dan terdekat. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak rektor yaitu **Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag** selaku pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beserta para Wakil Rektor.
2. Bapak dekan yaitu **Dr. Zulham, S.HI M.Hum** selaku pimpinan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU
3. Bunda **Fatimah Zahara, MA** selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu **Tetty Marlina Tarigan, M.Kn** selaku Sekretaris Jurusan Muamalah, yang telah memberikan nasihat dan arahan dalam menjalankan proses perkuliahan.
4. Ibu **Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag** (Pembimbing I) yang telah sabar dalam membimbing penulis dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Ibu **Dra. Sahlihah, M.Ag** (Pembimbing II) yang telah mengarahkan dan memberi saran juga selalu memotivasi saya untuk menulis dengan baik dan benar dalam penyelesaian Skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Serta Staf Pegawai Prodi Muamalah yang telah mengajarkan ilmu yang begitu bermanfaat bagi peneliti.
7. Terutama dan teristimewa Bapak dan Mama tercinta di rumah yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik peneliti sampai saat ini, memberikan dukungan cinta, kasih sayang dan doa sehingga karya kecil ini peneliti jadikan sebagai persembahan untuk kedua orang tua. Jika bukan karena ridho keduanya mungkin perjalanan pendidikan ini tak sampai pada masa gelar Sarjana. Kini peneliti telah ada pada tahap pendidikan Sarjana dan semua ini tak akan terlewat jika tidak ada do'a dan motivasi yang diberikan. Terima kasih juga untuk Adik saya (Sendi Kirana) yang telah banyak mendo'akan dan mendukung saya serta memberikan semangat kepada saya. Begitu juga terima kasih saya untuk saudara-saudara saya terkhusus Kakek saya (Ngatimin) dan Uwek saya (Ponisah) yang selalu mendoakan saya agar dapat cepat menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabatku yang paling baik dan senantiasa memberi semangat, Safrina Shiddiq S.T, Dika Ananda Siregar SH, Putri Ayu Ramjani Nasrul, Astri Maysarah Siregar, Feby Tri Tania, semoga sukses dan selalu di lindungi Allah.

9. Guru-Guruku Tercinta di SDN 101775 Sampali, SMP Pahlawan Nasional, dan MAN 2 Model Medan yang telah ikhlas mengajar dan membagi ilmunya tanpa pamrih.
10. Keluarga Besar Muamalah B stambuk 2015 .
11. Sahabat-Sahabat traveling sekaligus menambah ilmu Hafidzah Mazharani Tambunan, Nurhalizah, Ikhwanul Ihsan, Siti Nurhalizah, Nur Fadillah Atmajida, Haniah Irba dan semua sahabat yang tidak bisa dituliskan satu persatu.
12. Untuk keluarga besar Forum Kajian Ilmu Syari'ah (Fokis) terkhusus Arif Setiawan yang telah memberikan dukungan.

Akhirnya pada Allah SWT jugalah peneliti berserah diri, semoga amal baik semua ini bernilai ibadah disisi Allah SWT dan Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi peneliti serta bagi pembaca pada umumnya. Amin ya Rabbal Alamin.

Medan, 07 Februari 2020

Peneliti

LULU ELVIRAYANI

NIM. 24.15.3.070

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
IKHTISAR.	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.	1
B. Rumusan Masalah..	10
C. Tujuan Penelitian.	11
D. Manfaat Penelitian.	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Kerangka Teori.....	14
G. Hipotesis.	16
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan.	21

BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP JUAL BELI	
	PADA TABUNGAN PAKET LEBARAN.....	23
A.	Pengertian Jual Beli.	23
B.	Dasar Hukum Jual Beli.....	26
C.	Rukun dan Syarat Jual Beli.	29
D.	Bentuk-Bentuk Jual Beli yang Dilarang.	35
E.	Konsep Tabungan Paket Lebaran.....	38
BAB III	PELAKSANAAN TABUNGAN PAKET LEBARAN DI	
	DUSUN XXII PONDOK RAWA SAMPALI	
	KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI	
	SERDANG.....	42
A.	Kondisi Geografis Dusun XXII Pondok Rawa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang	42
B.	Kondisi Demografis Dusun XXII Pondok Rawa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang	43
C.	Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Di Dusun XXII Pondok Rawa Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.....	48

BAB IV HUKUM PELAKSANAAN TABUNGAN PAKET LEBARAN

DI DUSUN XXII DESA PONDOK RAWA SAMPALI

KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI

SERDANG.51

A. Hukum Pelaksanaan Tabungan Paket

Lebaran Perspektif Mazhab Syafi'i. 51

B. Pandangan Masyarakat Tentang Pelaksanaan

Tabungan Paket Lebaran Di Dusun XXII Desa

Pondok Rawa Sampali Kecamatan Percut

Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang..... 55

C. Analisa Penulis.60

BAB V PENUTUP 64

A. Kesimpulan.....64

B. Saran65

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Batas Wilayah Dusun XXII.	43
Tabel 2. Mata Pencaharian Masyarakat Di Dusun XXII. ...	45
Tabel 3. Agama Masyarakat Di Dusun XXII... ..	46
Tabel 4. Sarana Ibadah Di Dusun XXII.... ..	46
Tabel 5. Sarana Pendidikan Di Dusun XXII.....	47
Tabel 6. Jumlah Masyarakat Di Dusun XXII Berdasarkan Suku.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif, yaitu agama yang mengatur kehidupan manusia disegala penjuru dunia yang meliputi semua aspek kehidupan, meliputi akidah, syariah, akhlak, ibadah dan muamalah. Islam bukan hanya mengatur urusan manusia dengan Tuhannya, melainkan juga mengatur urusan manusia dengan sesamanya.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain, masing-masing berhajat kepada yang lain, saling tolong-menolong, tukar menukar keperluan dalam urusan kepentingan hidup baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam atau suatu usaha yang lain, baik bersifat pribadi maupun untuk kemaslahatan umat. Dengan demikian akan terjadi suatu kehidupan yang teratur dan menjadi ajang silaturahmi yang erat. Agar hak masing-masing tidak sia-sia dan guna menjaga kemaslahatan umat, maka agar semuanya dapat berjalan dengan lancar dan teratur, agama Islam memberikan peraturan yang sebaik-baiknya.

Islam memberikan aturan-aturan yang longgar dalam bidang muamalah, karena bidang tersebut amat dinamis mengalami perkembangan. Meskipun demikian, Islam memberikan ketentuan agar perkembangan di bidang muamalah tersebut tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak. Bidang muamalah berkaitan dengan kehidupan duniawi, namun dalam prakteknya tidak dapat dipisahkan dengan ukhrawi, sehingga dalam ketentuannya mengandung aspek halal, haram, sah, rusak dan batal.

Manusia melakukan berbagai macam kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, islam mengajarkan pola konsumsi yang moderat dan juga tidak berlebihan. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara para ekonom tentang definisi konsumsi, namun mayoritas definisi berkisar pada penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia.¹

Untuk memenuhi kebutuhan manusia yang paling banyak dilakukan adalah kegiatan jual beli. Jual beli itu merupakan bagian dari *ta'awun* (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang.

¹ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab*, (Jakarta: Khalifa, 2006), h. 135

Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridaan Allah swt. bahkan Rasulullah saw. menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.

Lain halnya, jual beli yang mengandung unsur kezaliman, seperti berdusta, mengurangi takaran, timbangan, dan ukuran, maka tidak lagi bernilai ibadah, tetapi sebaliknya, yaitu perbuatan dosa. Untuk menjadi pedagang yang jujur itu sangat berat, tetapi harus disadari bahwa kecurangan, kicuhan, dan kebohongan itu tidak ada gunanya. Untuk sementara, jual beli ini seperti menguntungkan, tetapi justru sebaliknya, sangat merugikan. Misalnya, pembeli yang merasa dirugikan, baik karena dikurangi kadarnya maupun kualitasnya, dapat dipastikan tidak akan berbelanja lagi ke tempat yang sama. Jika kecurangan dan dusta ini dipelihara, maka ke depan tidak akan ada lagi orang yang berbelanja, maka bangkrutlah usahanya. Selain itu, juga praktik kezaliman seperti ini akan mendapatkan murka dari Allah swt.²

Jual beli menurut bahasa disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h.89

lain. Lafal *al-bai'* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira'* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-bai'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiyah pengertian jual beli (*al-bai'*) secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-bai'*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *al-bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.³

Jual beli menurut istilah syara' ialah saling menukar harta dengan harta lainnya dengan cara-cara tertentu atau menukar harta dengan harta lainnya yang dapat dikembangkan setelah adanya serah terima dengan cara yang telah diatur.⁴ Jual beli disyari'atkan dalam al-Qur'an, sebagaimana Allah swt. berfirman dalam (Q.S An-Nisa : 29)

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2012), h. 101

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Afifi, dkk, Cet. I, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 618

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.⁵

Ayat di atas menegaskan bahwa kita tidak boleh memakan harta saudara kita dengan jalan yang tidak baik serta menyarankan untuk kita melakukan perdagangan yang kita saling ridha. Untuk itu kita tidak boleh melakukan kecurangan di dalam melakukan transaksi jual beli. Karena akan merugikan salah satu serta mendzaliminya.

Jual beli sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.⁶

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2000), h.65

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, h. 82

Menurut mazhab Syafi'i jual beli *gharar* hukumnya tidak sah (batal). Dalam kitab Mukhtashar al-Muzanni 'ala al-'Umm juz Sembilan Imam al-Muzanni mengatakan:

قال الشافعي : أخبرنا مالك عن أبي حزم بن دينار عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر قال : ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن عسب الفحل ولا يجوز بحال. ومن بيوع الغرر عندنا بيع ماليس عندك وبيع الحمل في بطن أمه والعبد الابق والطير ولحوت قبل أن يصادا وما أشبه ذلك.⁷

Artinya : “ Telah berkata oleh Imam Syafi'i : Telah memberitahukan kepada kami dari Abi Hazm bin Dinar dari Ibn al-Musayyib bahwa Rasulullah saw telah melarang dari jual beli yang mengandung unsur penipuan. Telah berkata ia, Dan telah melarang Nabi saw dari mengambil upah inseminasi hewan pejantan, dan tidak boleh bagaimanapun keadaannya. Dan daripada bentuk jual beli *gharar* menurut (mazhab) kita ialah menjual sesuatu yang tidak ada, dan menjual janin yang masih dalam kandungan induknya, dan (menjual) budak yang melarikan diri, dan menjual burung dan menjual ikan yang belum ditangkap dan segala bentuk jual beli yang sedemikian.”

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitab al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh juz kelima sebagai berikut :

⁷ Imam al-Muzanni, *Mukhtashar al-Muzanni 'Ala al-Umm*, (Beirut: Dar al-Khatib al-Ilmiyah, 2002), h. 123

اتفق الفقهاء على عدم صحة بيع الغرر، مثل بيع اللبن في الضرع، ولصوف على الظهر، واللؤلؤ في الصدف، والحمل في البطن، والسماك في الماء، والطير في الهواء قبل صيدهما، وبيع مال الغير على أن يشتريه فيسلمه، أي بيع ما سيملكه قبل ملكه له، لأن البائع باع ما ليس بملوك له في الحال، سواء أكان السمك في البحر، أم في النهر، أم في حظيرة لا يؤخذ منها إلا بصطياد، وسواء أكان الغرر في المبيع أم في الثمن.⁸

Artinya : “Para ahli fikih sepakat bahwa jual beli yang mengandung unsur gharar adalah jual beli yang tidak sah, seperti jual beli air susu yang masih di tetek, bulu domba yang masih dipunggong domba, permata yang masih ada di kerang laut, janin yang masih dalam kandungan, ikan di air, dan burung di udara sebelum ditangkap. Juga seperti jual beli barang orang lain untuk membeli dan menerimanya, ataupun jual beli barang yang akan dimiliki sebelum memilikinya, karena penjual dianggap telah menjual barang yang tidak dimilikinya saat transaksi, baik itu berupa ikan yang ada dilaut, di sungai, maupun di empang sebelum diambil atau ditangkap, baik *gharar* itu terjadi pada barang maupun harga barang”.⁹

Demikian halnya kehidupan masyarakat di dusun XXII desa pondok rawa sampali Kabupaten Deli Serdang. Sebagian masyarakat di desa ini bekerja sebagai petani di ladang dan juga membuka suatu usaha seperti ternak, grosir, jual beli paket

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, jus V (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 3411.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, jilid 5 (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 102

lebaran dan lain-lain. Pada penelitian ini penulis memfokuskan kepada usaha masyarakat dalam jual beli paket lebaran atau yang biasa masyarakat sebut sebagai tabungan paket lebaran.

Dalam tabungan paket lebaran ini akad yang digunakan adalah akad jual beli *salam*. *Bai' as-Salam* adalah salah satu bentuk jual beli di mana uang harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.¹⁰

Tabungan paket lebaran ini terdiri dari bahan-bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan pada saat lebaran. Tabungan paket lebaran ini terdiri dari paket A, AB dan B. Pada paket A berisi bahan-bahan pokok yaitu 2 kg daging sapi, 2 ekor ayam merah, 20 kg beras, 6 liter minyak kemasan, 5 kg gula, 1 papan telur, 2 bungkus tepung segitiga biru, 1 kg mentega dan 4 botol sirup kurnia. Harga yang tertera pada paket A adalah 900.000,- dan setiap minggunya adalah 20.000,-. Pada paket AB berisi bahan-bahan pokok yaitu 2 kg daging sapi, 2 ekor ayam merah, 20 kg beras, 2 liter minyak kemasan, 4 kg gula, 2 bungkus tepung segitiga biru, 1 kg mentega, 3 botol sirup kurnia. Harga yang tertera pada paket AB adalah 750.000,- dan setiap minggunya

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2019), h. 243

adalah 15.000,-. Dan pada paket B berisi bahan-bahan pokok yaitu 1 kg daging sapi, 1 papan telur, 10 kg beras, 3 liter minyak kemasan, 3 kg gula, 2 bungkus tepung segitiga biru dan 2 botol sirup kurnia. Harga yang tertera pada paket B adalah 450.000,- dan setiap minggunya adalah 10.000,-

Mengenai mekanismenya, penjual akan menawarkan paket lebaran ke ibu-ibu rumah tangga dan menjelaskan isi dari paket beserta harganya. Dana tabungan paket lebaran ini diambil setiap minggunya selama 45 kali. Setelah penjual mengumpulkan dana, penjual baru akan membeli semua barang untuk isi paket tersebut pada saat menjelang lebaran. Kemudian, paket tersebut akan di serahkan mulai dari H-7 sampai H-2 lebaran.

Dengan sistem yang demikian, mengenai pembayaran harus dilakukan secara tunai. Namun, masih saja ada pembayaran dilakukan secara angsuran bahkan ada yang dilunasi setelah lebaran. Selain itu, ketersediaan barangnya belum dapat dipastikan. Dikarenakan barang yang menjadi isi dari paket tersebut adalah barang yang cepat habis dan ada beberapa barang yang tidak dijelaskan secara rinci mengenai mereknya atau ukurannya.

Dengan demikian, jual beli tabungan paket lebaran di dusun XXII Pondok Rawa Sampali terdapat ketidaksesuaian pada akad

salam mengenai waktu pembayaran dan mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*). Baik pada barangnya maupun pada harganya.

Dari pemaparan di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN TABUNGAN PAKET LEBARAN PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI’I (Studi Kasus Di Dusun XXII Pondok Rawa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konsep jual beli pada tabungan paket lebaran?
2. Bagaimanakah pelaksanaan dan pandangan masyarakat terhadap tabungan paket lebaran di Dusun XXII Desa Pondok Rawa Sampali Kabupaten Deli Serdang?
3. Bagaimanakah hukum pelaksanaan tabungan paket lebaran di Dusun XXII Desa Pondok Rawa Sampali Kabupaten Deli Serdang ditinjau dari Mazhab Syafi’i?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep jual beli pada tabungan paket lebaran
2. Untuk mengetahui pelaksanaan dan pandangan masyarakat terhadap tabungan paket lebaran di dusun XXII desa pondok rawa sampali Kabupaten Deli Serdang
3. Untuk mengetahui mengetahui hukum pelaksanaan tabungan paket lebaran di Dusun XXII Desa Pondok Rawa Sampali Kabupaten Deli Serdang ditinjau dari Mazhab Syafi'i

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, kiranya penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan dengan hukum pelaksanaan tabungan paket lebaran perspektif mazhab Syafi'i. Bagi akademik, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat

digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian.

2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi pihak yang terkait dengan jual beli sesuai dengan hukum Islam. Bagi penulis, untuk mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Kajian Pustaka

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak karya tulis yang membahas permasalahan yang sama. Setelah penulis mengadakan pencarian literatur, penulis menemukan beberapa judul yang berkaitan tentang tinjauan hukum terhadap pelaksanaan tabungan paket lebaran, diantaranya adalah:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Zulichah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran (Studi Kasus di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal)”, skripsi ini membahas tentang penggunaan dua akad yaitu akad *wadi’ah yad dhamanah* dan *bai’ istishna* yang dalam hukum islam tidak sah

karena islam melarang dalam satu transaksi terdapat dua akad sekaligus.¹¹

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Mirfaqotul Asdiqo', "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tabungan Lebaran Di Pasar Tersono Batang", skripsi ini membahas tentang pinjaman tabungan lebaran yang apabila peminjaman lebih dari waktu yang sudah di tentukan akan dikenai tambahan pembayaran.¹²

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Dina Tri Wulansari, "Praktik Bagi Hasil Tabungan Idul Fitri Dalam Bentuk Parsel Di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo", skripsi ini membahas tentang pembagian keuntungan tidak diberikan secara pasti dan otomatis di awal perjanjian. Tetapi, pembagian keuntungan dibagi secara presentase dan pembagian nisbah disini berupa parsel lebaran.¹³

Penelitian ini berbeda dari skripsi-skripsi yang penulis paparkan di atas. Dimana di dalam penelitian ini penulis membahas mengenai jual beli *gharar* yang terdapat dalam tabungan paket lebaran baik pada barang maupun harganya. Sementara terdapat

¹¹ Zulichah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran (Studi Kasus di KUD "Darma Tani" Kec. Boja Kab. Kendal)*, (Semarang : IAIN Walisongo, 2008).

¹² Mirfaqotul Asdiqo', *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tabungan Lebaran Di Pasar Tersono Batang*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015).

¹³ Dina Tri Wulansari, *Praktik Bagi Hasil Tabungan Idul Fitri Dalam Bentuk Parsel Di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo (Studi Hukum Islam)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018).

persamaan dari skripsi-skripsi di atas yaitu sama-sama membahas mengenai tabungan paket lebaran.

F. Kerangka Teoritis

Jual beli menurut pengertian bahasanya adalah saling menukar. Dan kata *al-Bai'* (jual) dan *asy-Syiraa'* (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Dua kata ini mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang. Menurut pengertian syariat, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan.¹⁴

Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, Hadits dan Ijma' Ulama. Diantara dalil yang membolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ. (٢٧٥)

Artinya : orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri sendiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah XII*, alih bahasa Kamaludin A Marzuki, (Bandung: PT Alma'arif, 1989), h. 45.

dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah 2: 275) ¹⁵

Ayat tersebut menjelaskan tentang dasar kehalalan (kebolehan) hukum jual beli dan keharaman (menolak) riba. Allah SWT adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Maka, jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk dilaksanakan.¹⁶

Mazhab Syafi'i tidak ada secara langsung mengatakan tentang jual beli tabungan paket lebaran. Maka dari itu, penulis menggunakan pengqiyasan terhadap mazhab Syafi'i mengenai objek jual beli tabungan paket lebaran sebagai berikut:

- a. *al-Ashl*, yaitu kejadian yang hukumnya disebutkan di dalam *nash*. Dalam hal ini adalah jual beli *gharar*. *Gharar* yang terjadi pada jual beli barang yang tidak dijelaskan mengenai merek dan ukuran barangnya serta ketidaksesuaian akad yang digunakan.
- b. *Furu'*, yaitu kejadian yang hukumnya tidak disebutkan di dalam *nash* atau yang akan disamakan dalam hukumnya. Dalam hal ini yang menjadi peristiwa yang tidak ada *nash* nya adalah jual beli

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.36

¹⁶ <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qura/article/view/2025> di akses pada hari selasa tanggal 01 oktober 2019 pukul 21.13

tabungan paket lebaran dengan melihat barang yang tidak dijelaskan secara rinci mengenai merek dan ukuran serta ketidaksesuaian akadnya.

- c. *al-Hukmul al-Ashl*, yaitu hukum syara' yang dibawa oleh *nash* dalam masalah asal tujuannya adalah menjadi dasar bagi masalah baru. Dalam hal ini adalah *gharar* hukumnya tidak sah.
- d. *Illat*, yaitu alasan yang dijadikan dasar oleh hukum asal, yang berdasarkan adanya *illat* itu pada masalah baru itu disamakan dengan masalah hukumnya. Dalam hal ini sifat yang terdapat pada *ashl* sama-sama tidak pasti, barang tidak ada pada penjual dan tidak dijelaskan secara rinci serta adanya ketidakseuaian akad.

G. Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mempunyai hipotesis bahwa praktek usaha jual beli tabungan paket lebaran di dusun XXII desa pondok rawa sampali Kabupaten Deli Serdang belum sesuai dengan pendapat Mazhab Syafi'i. Karena di dalamnya terdapat unsur ketidakjelasan yang mana barang tidak dijelaskan oleh si penjual secara rinci mengenai merek minyak kemasan dan ukuran telurnya serta terdapat ketidaksesuaian akad *salam* yang digunakan, di mana pada saat pembayaran dilakukan secara angsuran bahkan sampai ada yang dilakukan setelah lebaran.

Padahal seharusnya pembayaran dilakukan lunas pada awal ketika melakukan akad. Sehingga transaksi ini menyebabkan akad jual beli yang dilakukan menjadi batal.

H. Metode Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman cara kerja penelitian skripsi ini, maka penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian dengan pendekatan yuridis empiris yaitu prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.¹⁷ Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat.¹⁸

2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *conceptual and case approach*. Pendekatan ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), h. 52

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 40

hukum secara empiris dengan cara meneliti langsung objek penelitian yaitu tabungan paket lebaran adalah tabungan untuk membeli suatu barang di masa yang mendatang. Dimana barang-barang paket lebaran belum dimiliki oleh si penjual dan baru akan dimiliki pada masa yang akan datang. Sehingga barang yang menjadi paket tersebut harus dijelaskan secara rinci mengenai merek dan ukurannya serta mekanisme pembayarannya harus disesuaikan dengan akad yang digunakan. Praktik yang dilakukan masyarakat di Dusun XXII Pondok Rawa Sampali ini mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan, baik pada barang maupun harga barang serta ketidaksesuaian akad yang digunakan.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah Dusun XXII Pondok Rawa Sampali Kabupaten Deli Serdang.

4. Sumber Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini menggunakan 3 sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan pustaka yang berisikan buku-buku mazhab Syafi'i yaitu kitab Mukhtashar al-Muzanni 'Ala al Umm juz 9 yang ditulis oleh Imam Muzanni dan Al-

Fiqh al-Islam Wa Adillatuh juz 5 yang ditulis oleh Wahbah az-Zuhaili. Selain itu juga didapat dari responden di lokasi penelitian yaitu hasil wawancara dengan masyarakat, penjual dan juga para anggota tabungan paket lebaran.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis yaitu literatur yang membahas mengenai jual beli *gharar* yakni al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh yang ditulis oleh Wahbah az-Zuhaili, Pengantar Fiqh Muamalah yang ditulis oleh Dimyudin Djuwini dan Fiqh Muamalah yang ditulis oleh Abdul Rahman Ghazaly.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum dan jurnal dari internet yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan prosedur pengumpulan bahan hukum yang berupa:

a. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data penelitian langsung dari informan yang memahami berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan Ibu Sinta dan Ibu-Ibu yang mengikuti tabungan paket lebaran.

b. Studi Dokumen

Perolehan data dengan cara mencatat hasil wawancara, hasil rekaman dari narasumber dan foto-foto yang diperlukan dalam penelitian.

6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan dan analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini terarah dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan tentang jual beli di dalam tabungan paket lebaran yang terdiri dari pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, konsep dan pengertian tabungan paket lebaran.

Bab ketiga merupakan tinjauan umum Desa Pondok Rawa Sampali Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari letak geografis, keadaan demografis, agama, pendidikan dan sosial budaya serta pelaksanaan tabungan paket lebaran.

Bab keempat merupakan temuan dan pembahasan yang terdiri dari hukum pelaksanaan tabungan paket lebaran menurut Mazhab Syafi'i dan pemahaman-pemahaman masyarakat di dusun XXII

desa pondok rawa sampali Kabupaten Deli Serdang terhadap tabungan paket lebaran, serta analisa penulis.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP JUAL BELI PADA TABUNGAN PAKET LEBARAN

A. Definisi Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah az-Zuhailly mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.¹⁹

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama *fiqh*, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq²⁰, mendefinisikannya dengan :

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِ، أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ.

“Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan” atau, “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”

Dalam definisi di atas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan” “ganti” dan “dapat dibenarkan” (*al-ma'dzun fih*). Yang dimaksud

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, jus V (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 3304.

²⁰ Sayyid sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 126

harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat; yang di maksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik; yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian); sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.²¹

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili, jual beli adalah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ، أَوْ مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرْغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ.

“Saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu”. Atau, “tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.

Dalam definisi ini terkandung pengertian “cara yang khusus”, yang dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan kabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 67

termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.²²

Definisi lain yang dikemukakan Ibn Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah), yang juga dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili, jual beli adalah :

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِكًا وَتَمْلُكًا

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan”

Dalam definisi ini ditekankan kata “milik dan pemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*al-ijarah*).²³

Menurut kitab *Fathul mu'in* karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz dijelaskan: menurut bahasanya, jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara' ialah menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu.²⁴

²² *Ibid*, h. 68

²³ *Ibid*

²⁴ Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, alih bahasa Aliy As'ad (Kudus: Menara Kudus, 1979), h. 158.

Dalam melakukan jual beli, hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-sejujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain-lain.

Jika barang yang diperjual belikan tidak sesuai dengan yang tersebut diatas, artinya tidak mengindahkan peraturan-peraturan jual beli, perbuatan dan barang hasil jual beli yang dilakukan haram hukumnya, haram dipakai dan haram dimakan sebab tergolong perbuatan batil (tidak sah).

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. Terdapat di dalam ayat al-Qur'an dan sunah Rasulullah Saw. yang berbicara tentang jual beli, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu

sendiri. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. an-Nisa 4:29)²⁵

Ayat di atas menjelaskan agar orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tidak memakan harta sebagian lainnya dengan cara yang batil, yaitu dengan cara yang tidak diperbolehkan syariat seperti mencuri, korupsi, *ghasab*, riba, perjudian, dan sejenis itu semua. Allah menghalalkan cara yang terhormat seperti dagang atau perniagaan. Ungkapan dalam ayat menggunakan kalimat membunuh diri, untuk menyatakan sifat berlebih-lebihan dalam berbuat dosa. Dalam makna zhahirnya bermakna buruh diri. Larangan ini adalah termasuk di antara rahmat Allah kepada kamu.²⁶

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra..

عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع
الغرر

(رواه مسلم)²⁷

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2000), h.65

²⁶ Syaikh Muhammad Ali Ash- Shabuni, *Shafwatut Tafasir; Tafsir-tafsir Pilihan*, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), h. 627

²⁷ Imam al-Hafidz Mahyuddin Abu Zakariyah, *Syarhu an-Nawawi 'Ala Muslim*. (Urdun : Baitu al-Afkar ad-Dauliyah, 2000), h. 963

Artinya : “Rasulullah Saw. melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli *gharar* (yang belum jelas harga, barang, waktu, dan tempatnya)” (HR. Muslim)²⁸

Hadits di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah Saw., telah melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli *gharar*. *Gharar* yang dimaksud adalah *gharar* baik pada harga, barang, waktu dan tempatnya.

Para ulama juga sepakat (*ijma'*) atas kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia sering berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja tanpa adanya kompensasi yang harus diberikan. Maka, dengan di syariatkan-Nya jual beli merupakan cara mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Karena pada dasarnya, manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Dan berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka jelas sekali bahwa pada dasarnya praktik/akad jual beli mendapatkan pengakuan syara' dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.²⁹

²⁸ Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugul Maram*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013), h. 322

²⁹ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 73.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat³⁰, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
2. Ada *shighat* (ijab dan kabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut:

a. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- 1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah *mumayiz*, menurut ulama Hanafiyah apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan melakukan jual beli khususnya barang-

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adilatuh*, h. 3309

barang yang tidak bernilai tinggi.³¹ Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan.

- 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

b. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab kabul

Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab kabul dilakukan. Hal ini karena ijab kabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya ijab kabul itu harus dilakukan dengan lisan. Syarat akad yang penting adalah bahwa kabul harus sesuai dengan ijab.³² Akan tetapi, kalau tidak mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau penjualnya jauh, Boleh dengan perantaraan surat menyurat yang mengandung arti ijab kabul itu.

Hadist Rasulullah SAW. Menyatakan :

³¹ Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 130.

³² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2019), h. 189

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يفتقر قن
اثنان الا عن تراض³³

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW., beliau bersabda, “Dua orang yang berjual beli belumlah boleh berpisah sebelum mereka berkerelaan.” (H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Menurut mereka, ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa-menyewa dan nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hiba dan wakaf, tidak perlu kabul, karena akad seperti ini cukup ijab saja. Akad yang sudah memenuhi rukun dan berbagai syarat harus mengikat kedua belah pihak.³⁴

Akad sebagaimana yang diartikan sebagai suatu bentuk perikatan atau perjanjian, maka untuk kata *mitsaq* juga diartikan dengan perikatan atau perjanjian, namun perjanjian disini dilakukan sebagai ungkapan bagi pelaku akad bukan saja

³³ Mohammad Isa bin Surah At Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi*, Juz 3, (Beirut: Darul Fikri, 1992), h.26

³⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 30

dalam kaitan pemenuhan kebutuhan di bidang ekonomi, namun lebih dari itu sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam Alqur'an pada tiga tempat.³⁵

Apabila ijab kabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai/uang berpindah tangan menjadi milik penjual. Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul itu sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.
 - b) Kabul sesuai dengan ijab.
 - c) Ijab dan kabul itu dilakukan di satu majelis.³⁶
- c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*)

Harus jelas bentuk, kadar dan sifat-sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah. Imam Syafi'i telah mengatakan, tidak sah jual beli tersebut karena ada

³⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan : FEBI UINSU Press, 2010), h. 53

³⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah.*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 116-117

unsur penipuan. Para Imam tiga dan golongan ulama madzhab kita juga mengatakan hal yang serupa.³⁷

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- 1) Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di satu toko karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara menyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki.

³⁷ Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*, (CV Bina Iman, 1995), h. 535.

- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. Objek harus dapat diserahkan pada saat transaksi.³⁸

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama *fiqh* membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara actual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Oleh sebab itu harga yang dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-tsaman*.³⁹

Para ulama *fiqh* mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut :

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila

³⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 27

³⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, h. 76

harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.

- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayyadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.⁴⁰

D. Bentuk-Bentuk Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi dua: *pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua*, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli, yaitu : ⁴¹

1. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi rukun dan syarat.

Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

- a. Jual beli yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti anjing, babi dan

⁴⁰ *Ibid*, h. 77

⁴¹ *Ibid*, h. 80

lainnya.⁴² Hasil penjualan najis menjadi haram karena salah satu syarat sah jual beli tidak terpenuhi, yaitu barang yang menjadi objek jual beli haruslah suci.⁴³

Adapun bentuk jual beli yang dilarang karena barangnya yang tidak boleh diperjualbelikan adalah air susu ibu dan air mani (sperma) binatang. Para ulama *fiqh* berbeda pendapat dalam masalah jual beli air susu ibu. Imam Syafi'i dan Imam Malik membolehkan dengan mengambil analogi dan alasan seperti air susu hewan. Adapun Imam Abu Hanifah melarangnya, alasannya, karena air susu merupakan bagian dari daging manusia yang haram diperjualbelikan.⁴⁴

b. Jual beli yang belum jelas

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barang yang dijual,

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 72

⁴³ Erwandi Tarmizi, *Halal Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor : PT. Berkas Mulia Insani, 2019), h. 58

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, h. 81

harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.⁴⁵

c. Jual beli bersyarat

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.⁴⁶

2. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.

a. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar.

Apabila ada dua orang yang masih tawar menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawaran pertama diputuskan.

Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan hal ini telah melakukan hal yang haram sehingga pelakunya tergolong sebagai pelaku maksiat. Meski demikian mayoritas ulama mengatakan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang yang melanggar larangan di atas adalah transaksi jual beli yang sah. Sedangkan menawarkan barang yang dijual

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h. 191

⁴⁶ Masduki, *Fiqh Muamalah Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Semarang: Rasail Media Group, 2017), h. 57

dengan sistem lelang hukumnya tidak haram meski barang tersebut sudah ditawarkan oleh orang sebelumnya.

b. Jual beli dengan menghadang dagangan dari luar kota/pasar.

Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.

c. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun.

Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.⁴⁷

E. Konsep Tabungan Paket Lebaran

Tabungan paket lebaran merupakan kegiatan tabungan yang menggunakan akad jual beli. Dalam tabungan paket lebaran sistem operasionalnya menggunakan akad jual beli yang dilakukan secara

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 82-83

angsuran. Akad jual beli yang digunakan dalam tabungan paket lebaran adalah *bai' salam*.

Secara bahasa *salam* (سلم) adalah *al-i'tha'* (الإعطاء) dan *at-taslif* (التسليف) dimana keduanya bermakna pemberian. Sedangkan secara istilah syariah, akad *salam* didefinisikan oleh para *fuqaha* yaitu jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran yang dilakukan saat itu juga. Jual beli *salam* adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian hari atau waktu yang telah ditentukan. Menurut ulama Syafi'iyah akad *salam* boleh ditanggungkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai.⁴⁸

Dalam jual beli *salam* terdapat rukun yang harus dipenuhi yakni, *aqid* yaitu pembeli (*al-muslim*) dan penjual (*al-muslam ilaih*), *ma'qud 'alaih* yaitu *muslam fih* (barang yang dipesan), dan harga atau modal *salam* (*ra's al-mal as-salam*) dan yang terakhir adalah *sighat* (ijab dan kabul).⁴⁹ Syarat-syarat *salam* ini ada yang berkaitan dengan *ra's al-mal* (modal atau harga), dan ada yang

⁴⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2011), h. 294.

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h. 245

berkaitan dengan *muslam fih* (objek akad atau barang yang dipesan). Secara umum ulama-ulama mazhab sepakat bahwa ada enam syarat yang harus dipenuhi agar salam menjadi sah, yaitu jenis *muslam fih* harus diketahui, sifatnya diketahui, ukuran dan kadarnya diketahui, masanya tertentu, mengetahui kadar (ukuran) *ra's al-mal* (modal/harga), dan menyebutkan tempat pemesanan/penyerahan.

Menurut KHES pasal 103 ayat 1-3 menyebutkan syarat salam sebagai berikut: “ (1) Jual beli salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang yang sudah jelas. (2) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran, timbangan, dan meteran. (3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.”

Tabungan paket lebaran ini memberikan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan lebaran agar terasa ringan. Tabungan paket lebaran merupakan inovasi baru, karena kebutuhan lebaran dapat diangsur sejak dini yaitu dimulai sejak setelah lebaran sampai menjelang lebaran. Setoran dilakukan setiap minggu selama 45-48 minggu. Dan pengembaliannya berupa paket kebutuhan lebaran yang harganya disesuaikan dengan paket yang dipilih.

Paket yang akan diterima oleh anggota telah ditentukan di dalam buku tabungan, yaitu berupa pilihan paket kebutuhan

lebaran yang macam dan takarannya sudah ditentukan dan anggota berhak memilih paket sesuai dengan yang dikehendaknya pada saat mendaftar menjadi anggota.

Tabungan paket lebaran ini terdiri dari paket A, AB dan B. Pada paket A berisi bahan-bahan pokok yaitu 2 kg daging sapi, 2 ekor ayam merah, 20 kg beras, 6 liter minyak kemasan, 5 kg gula, 1 papan telur, 2 bungkus tepung segitiga biru, 1 kg mentega dan 4 botol sirup kurnia. Harga yang tertera pada paket A adalah 900.000,- dan setiap minggunya adalah 20.000,-. Pada paket AB berisi bahan-bahan pokok yaitu 2 kg daging sapi, 2 ekor ayam merah, 20 kg beras, 2 liter minyak kemasan, 4 kg gula, 2 bungkus tepung segitiga biru, 1 kg mentega, 3 botol sirup kurnia. Harga yang tertera pada paket AB adalah 750.000,- dan setiap minggunya adalah 15.000,-. Dan pada paket B berisi bahan-bahan pokok yaitu 1 kg daging sapi, 1 papan telur, 10 kg beras, 3 liter minyak kemasan, 3 kg gula, 2 bungkus tepung segitiga biru dan 2 botol sirup kurnia. Harga yang tertera pada paket B adalah 450.000,- dan setiap minggunya adalah 10.000,-

BAB III

PELAKSANAAN TABUNGAN PAKET LEBARAN DI DUSUN XXII

PONDOK RAWA SAMPALI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN

KABUPATEN DELI SERDANG

A. Kondisi Geografis Dusun XXII Pondok Rawa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Dusun XXII Pondok Rawa merupakan salah satu dusun yang ada di Desa Sampali, yaitu tepatnya berada di kabupaten Deli Serdang kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Secara keseluruhan wilayah Dusun XXII merupakan daerah potensial untuk dikelola dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan warganya. Untuk lebih mudah mengatur masyarakat di Dusun ini, maka dipimpin oleh seorang kepala Dusun, yaitu Bapak Paijo.

Jarak Dusun ke Kantor Desa kurang lebih 3 km. Dusun XXII merupakan daerah yang luas dan dipenuhi dengan dataran hijau. Luas wilayah dusun adalah 17 hektar. Dusun XXII juga merupakan dusun yang terbesar di antara dusun yang lainnya. Batas-batas wilayah Dusun XXII Pondok Rawa Desa Sampali adalah sebagai berikut:

Tabel. 1**Batas Wilayah Dusun XXII**

No	Arah	Berbatasan dengan
1	Sebelah Utara	Desa Lau Dendang
2	Sebelah Selatan	Desa Saentis
3	Sebelah Timur	Desa Bandar setia
4	Sebelah Barat	Dusun XXI Jatirejo

Sumber : Data Dusun XXII, 2019.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa batas wilayah Dusun XXII Pondok Rawa Desa Sampali pada bahagian Utara adalah Desa Lau Dendang. Batas wilayah sebelah Selatan adalah Desa Saentis. Batas wilayah sebelah Timur adalah Desa Bandar Setia. Dan batas wilayah sebelah Barat adalah Dusun XXI Jatirejo Desa Sampali. Pada ketiga bagian ini terletak di Kecamatan dan Kabupaten yang sama dengan Dusun XXII Pondok Rawa Desa Sampali.

**B. Kondisi Demografis Dusun XXII Pondok Rawa Sampali
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang**

1. Penduduk

Penduduk di Dusun XXII merupakan penduduk heterogen. Berbagai macam ras, etnis, dan budaya ada di Dusun tersebut. Penduduk Dusun XXII Pondok Rawa Sampali berjumlah 862 jiwa dan 270 kartu keluarga. Dilihat dari jenis kelamin penduduk,

maka penduduk di Dusun tersebut dikelompokkan kepada dua jenis sebagaimana lazimnya, yakni laki-laki dan perempuan. Penduduk di Dusun XXII lebih dominan jenis kelamin laki-laki daripada perempuan.

2. Mata Pencaharian

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat di Dusun XXII Pondok Rawa Desa Sampali mencari mata pencaharian sesuai dengan mata pencaharian yang ditekuni. Sebagian dari masyarakat di Dusun ada yang mata pencahariannya sebagai Karyawan Swasta, Pedagang, Buruh Tani Kebun, Peternakan, Polisi, Pegawai Negeri Sipil dan lain-lain. Untuk mengetahui mata pencaharian masyarakat di Dusun XXII Pondok Rawa Desa Sampali dapat dilihat tabel di bawah ini:

Tabel. 2**Mata Pencaharian Masyarakat di Dusun XXII**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Karyawan Swasta	171 jiwa
2	Pedagang	129 jiwa
3	Buruh Tani Kebun	130 jiwa
4	Peternakan	258 jiwa
5	Polisi	-
6	Pegawai Negeri Sipil	2 jiwa
7	Lain-lain	172 jiwa
Jumlah		862 jiwa

Sumber : Data Dusun XXII, 2019.

Melalui data di atas dapat dilihat bahwa mata pencaharian masyarakat di Dusun XXII Pondok Rawa Sampali ada berbagai macam. Untuk karyawan swasta sebanyak 171 jiwa dari masyarakat di Dusun. Yang mata pencaharian Pedagang sebanyak 129 jiwa, baik berdagang di Dusun itu sendiri maupun di luar Dusun. Dikarenakan letak dusun adalah dataran hijau yang luas, masyarakat di sana juga banyak yang berkebun. Untuk mata pencaharian Buruh Tani Kebun sebanyak 130 jiwa. Namun, mata pencaharian di Dusun tersebut lebih dominan pada Peternakan. Sebanyak 258 jiwa masyarakat memiliki pencaharian sebagai Peternak ataupun memiliki usaha Peternakan. Hal demikian dikarenakan di Dusun tersebut merupakan wilayah yang memiliki dataran hijau yang luas.

3. Agama

Di Dusun XXII Pondok Rawa Desa Sampali masyarakatnya beragama Islam, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3
Agama Masyarakat di Dusun XXII

No	Agama	Jumlah
1	Islam	862 jiwa
2	Kristen Protestan	-
3	Khatolik	-
4	Hindu	-
5	Buddha	-
Jumlah		862 jiwa

Sumber : Data Dusun XXII, 2019.

Sarana ibadah di Dusun XXII Pondok Rawa Desa Sampali dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 4
Sarana Ibadah di Dusun XXII

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	1 unit
2	Mushalla	-
3	Gereja	-
4	Kuil	-
Jumlah		1 unit

Sumber: Data Dusun XXII, 2019.

Dapat dilihat dari data kedua tabel di atas, bahwa agama yang dianut di Dusun tersebut adalah agama Islam.

Dikarenakan agama yang dianut adalah agama Islam, di Dusun tersebut hanya tersedia sarana ibadah berupa Masjid.

4. Pendidikan

Tingkat pendidikan yang ada di tengah masyarakat di Dusun XXII Pondok Rawa Desa Sampali dapat dilihat melalui sarana pendidikan yang ada pada tabel berikut ini:

Tabel. 5
Sarana Pendidikan di Dusun XXII

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	1 unit
2	SD	1 unit
3	SMP	-
4	SMA	-
Jumlah		2 unit

Sumber : Data Dusun XXII, 2019.

Penjelasan tabel di atas dapat dipahami bahwa di Dusun XXII Pondok Rawa Desa Sampali hanya terdapat sarana pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Untuk tingkat selanjutnya anak-anak di Dusun akan bersekolah di sekolah yang dekat dengan kantor Desa.

5. Adat

Di Dusun XXII Pondok Rawa Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang terdapat beberapa suku dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 6**Jumlah Masyarakat di Dusun XXII Berdasarkan Suku**

No	Jenis Suku	Jumlah
1	Batak Mandailing	19 jiwa
2	Jawa	827 jiwa
3	Melayu	16 jiwa
4	Batak Toba	-
Jumlah		862 jiwa

Sumber : Data Dusun XXII, 2019.

Suku di Dusun XXII lebih dominan suku Jawa. Selain itu, terdapat suku Batak Mandailing sebanyak 19 jiwa, suku melayu sebanyak 16 jiwa. Suku Batak Mandailing dan Melayu ada ketika terjadinya pernikahan. Dikarenakan pada awalnya masyarakat di Dusun tersebut bersuku Jawa.

C. Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Di Dusun XXII Pondok Rawa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Tabungan paket lebaran merupakan suatu kegiatan jual beli pesanan seperti biasa, yakni dengan cara memesan barang kepada penjual paket. Barang pesanan tersebut tidak diperlihatkan bentuk spesifikasinya dan hanya melihat selebaran kertas yang berisi tulisan macam-macam barang dan harga serta berat timbangannya.

Dana tabungan paket lebaran ini diambil oleh penjual setiap minggunya selama 45 kali. Setelah penjual mengumpulkan dana, penjual baru akan membeli semua barang untuk isi paket tersebut pada saat menjelang lebaran. Kemudian, paket tersebut akan di serahkan mulai dari H-7 sampai H-2 lebaran sesuai kesepakatan.

Pada pelaksanaan tabungan paket lebaran di Dusun XXII Pondok Rawa Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ditawarkan oleh penjual kepada ibu-ibu rumah tangga. Penjual menjelaskan masing-masing isi dari paket dan harga paket. Penjual juga mengajak ibu-ibu rumah tangga yang ditawarkan untuk menawarkan juga kepada ibu-ibu yang lain. Para anggota memilih paket yang mereka inginkan dan akan membayar setiap minggunya. Penjual akan memberikan kartu sebagai tanda anggota beserta kolom pembayaran setiap minggunya.

Tabungan paket lebaran di Pondok Rawa Desa Sampali sudah lama berkembang. Hal-hal yang berkaitan dengan tabungan paket lebaran adalah pembayaran paket dan kualitas barangnya. Harga dari setiap paket sudah ditentukan oleh penjual pada saat menawarkan paket tersebut. Penjual juga tidak menjelaskan keseluruhan barang mengenai merek dan juga ukurannya. Pembayaran paket juga dilakukan secara angsuran sampai menjelang lebaran. Oleh sebab itu, pelaksanaan tabungan paket

lebaran ini mengandung ketidakjelasan karena ketidaksesuaian dengan akad yang digunakan dan juga terdapat beberapa jenis barang yang tidak dijelaskan.

Permasalahan yang muncul dari pelaksanaan tabungan paket lebaran di Dusun XXII Pondok Rawa Sampali adalah ketidaksesuaian akad yang digunakan di mana pembayaran pada akad *salam* dilakukan secara tunai pada saat akad namun barang diserahkan kemudian. Selain itu, penjual juga tidak menjelaskan secara rinci barang apa yang akan ia berikan, seperti jenis gulanya, merek berasnya dan ukuran telurnya. Jika dilihat barang yang dipaketkan adalah barang-barang yang terdiri dari kualitas yang bermacam-macam. Pembeli tidak mengetahui kualitas barang yang akan ia dapatkan. Sehingga di dalam tabungan ini terdapat unsur *gharar* di dalamnya.

BAB IV

HUKUM PELAKSANAAN TABUNGAN PAKET LEBARAN DI DUSUN XXII PONDOK RAWA SAMPALI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG

A. Hukum Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Perspektif Mazhab Syafi'i

Kegiatan menabung merupakan hal yang penting dilakukan. Karena tabungan dapat di gunakan sebagai bekal masa depan atau bertujuan untuk berjaga-jaga dalam kebutuhan yang sangat penting di masa yang akan datang. Tabungan paket lebaran ini memberikan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan lebaran agar terasa ringan. Tabungan paket lebaran merupakan inovasi baru, karena kebutuhan lebaran dapat diangsur sejak dini yaitu dimulai sejak setelah lebaran sampai menjelang lebaran.

Akad yang digunakan dalam tabungan paket lebaran adalah akad jual beli *salam*. Di dalam pelaksanaan perdagangan (jual-beli) selain ada penjual dan pembeli, juga harus relevan dengan rukun dan syarat jual-beli, dan yang paling penting adalah tidak ada unsur penipuan. Jadi harus atas dasar suka sama suka atau saling rela. Anjuran untuk melaksanakan jual-beli yang baik dan benar atau harus saling suka sama suka.

Beberapa hal semacam kedzaliman, kecurangan, ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan diharamkan dalam jual beli. Sebaliknya keadilan, menyempurnakan takaran dan tidak menutupi cacat yang bisa mengurangi keuntungan harus dijaga. Salah satu bentuk kecurangan yang sering terjadi adalah *gharar*.

Gharar menurut bahasa adalah *al-khathr*; pertaruhan, *majhul al-aqibah*; tidak jelas hasilnya, ataupun dapat juga diartikan sebagai *al-mukhatharah*; pertaruhan dan *al-jahalah*; ketidakjelasan. *Gharar* artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain.⁵⁰ Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut.

Jual beli yang mengandung *gharar* adalah jual beli yang mengandung bahaya (kerugian bagi salah satu pihak) dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya. Jenis *gharar* yang membatalkan jual beli adalah *gharar* yang tidak jelas wujud

⁵⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 147

barang, yaitu setiap transaksi dimana barang masih dimungkinkan ada atau tidak adanya.⁵¹

Menurut mazhab Syafi'i jual beli *gharar* hukumnya tidak sah (batal). Dalam kitab *Mukhtashar al-Muzanni 'ala al-'Umm* juz Sembilan Imam al-Muzanni mengatakan:

قال الشافعي : أخبرنا مالك عن أبي حزم بن دينار عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر قال : ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن عصب الفحل ولا يجوز بحال. ومن يبيع الغرر عندنا بيع مالميس عندك وبيع الحمل في بطن أمه والعبد الأبق والطير ولحوت قبل أن يصادا وما أشبه

ذلك.⁵²

Artinya : “ Telah berkata oleh Imam Syafi'i : Telah memberitahukan kepada kami dari Abi Hazm bin Dinar dari Ibn al-Musayyib bahwa Rasulullah saw telah melarang dari jual beli yang mengandung unsur penipuan. Telah berkata ia, Dan telah melarang Nabi saw dari mengambil upah inseminasi hewan pejantan, dan tidak boleh bagaimanapun keadaannya. Dan daripada bentuk jual beli *gharar* menurut (mazhab) kita ialah menjual sesuatu yang tidak ada, dan menjual janin yang masih dalam kandungan induknya, dan (menjual) budak yang melarikan diri, dan menjual burung dan menjual ikan yang belum ditangkap dan segala bentuk jual beli yang sedemikian.”

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah XII*, alih bahasa Kamaludin A Marzuki, (Bandung: PT Alma'arif, 1989) h. 70.

⁵² Imam al-Muzanni, *Mukhtashar al-Muzanni 'Ala al-Umm*, (Beirut: Dar al-Khatab al-Ilmiyah, 2002), h. 123

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* juz kelima sebagai berikut :

اتفق الفقهاء على عدم صحة بيع الغرر، مثل بيع اللبن في الضرع، ولصوف على الظهر واللؤلؤ في الصدف، والحمل في البطن، والسماك في الماء، والطيور في الهواء قبل صيدهما، وبيع مال الغير على أن يشتريه فيسلمه، أي بيع ما سيملكه قبل ملكه له، لأن البائع باع ما ليس بملوك له في الحال، سواء أكان السمك في البحر، أم في النهر، أم في حظيرة لا يؤخذ منها إلا بصطياد، وسواء أكان الغرر في المبيع أم في الثمن.⁵³

Artinya : “Para ahli fikih sepakat bahwa jual beli yang mengandung unsur gharar adalah jual beli yang tidak sah, seperti jual beli air susu yang masih di tetek, bulu domba yang masih dipunggung domba, permata yang masih ada di kerang laut, janin yang masih dalam kandungan, ikan di air, dan burung di udara sebelum ditangkap. Juga seperti jual beli barang orang lain untuk membeli dan menerimanya, ataupun jual beli barang yang akan dimiliki sebelum memilikinya, karena penjual dianggap telah menjual barang yang tidak dimilikinya saat transaksi, baik itu berupa ikan yang ada dilaut, di sungai, maupun di empang sebelum diambil atau ditangkap, baik *gharar* itu terjadi pada barang maupun harga barang”.⁵⁴

Jual beli *gharar* hukumnya tidak boleh, baik *gharar* itu terjadi pada barang maupun harga barang. Praktik ini mengandung unsur ketidakpastian akan ketersediaan barang, kualitas barang, jenis

⁵³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, jus V (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 3411.

⁵⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, jilid 5 (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 102

dan ukuran barang yang tidak dirincikan dan juga harga barang. Jadi, transaksi tersebut hukumnya tidak boleh. Di samping itu, jika penjual menentukan harga paket dengan melihat harga di tahun sebelumnya dan menambahkan sedikit tambahan harga tentu itu tidak dibolehkan. Dengan demikian transaksi ini tidak dibolehkan selagi mengandung unsur *gharar* tersebut.

B. Pandangan Masyarakat Tentang Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Di Dusun XXII Desa Pondok Rawa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Program tabungan paket lebaran merupakan program yang sangat membantu masyarakat yang tidak ingin repot berbelanja di pasar. Hal demikian dikarenakan masyarakat hanya memberikan uang setiap minggunya dan akan mendapatkan bahan-bahan pokok pada saat menjelang lebaran.

Bahan-bahan pokok yang didapat adalah bahan pokok yang sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Bahan pokok tersebut terdiri dari daging sapi, daging ayam, beras, minyak kemasan, gula, tepung, sirup dan lain-lain. Selain membantu masyarakat, tabungan paket lebaran ini adalah salah satu usaha yang sangat digemari oleh masyarakat di Dusun tersebut.

Meskipun demikian, pelaksanaan tabungan paket lebaran masih dipertanyakan mengenai hukumnya. Yang dimaksud disini adalah

apakah transaksi tabungan paket lebaran dibolehkan menurut mazhab Syafi'i.

Menurut Ibu Wati yang merupakan penjual tabungan paket lebaran yang beralamat di Dusun XXII Pondok Rawa Sampali, penulis mewawancarai beliau pada hari Selasa 26 November 2019, ketika penulis menanyakan apakah ibu mengetahui bahwa jual beli yang belum pasti harganya itu boleh atau tidak, apakah ibu pernah mengalami kerugian, bagaimana cara ibu mengatasi kerugian di tahun berikutnya, dia mengatakan bahwa selama ini dia hanya memperkirakan kenaikan harga yang terjadi tanpa mempertimbangkan hukum dari kejelasan harga tersebut. Selain itu, dia juga mengatakan pernah mengalami kerugian pada tahun pertama dikarenakan belum mengetahui strategi pemasaran dan dia hanya mengambil keuntungan yang sedikit. Untuk mengatasi agar tidak terjadinya kerugian, dia membelanjakan barang paket lebaran tersebut pada saat harga murah.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 dengan ibu Yuli, salah satu anggota dari tabungan paket lebaran dengan pertanyaan, apakah ibu pernah belanja di pasar lebih menghemat daripada ikut tabungan paket lebaran ini,

⁵⁵ Ibu Wati, Penjual, Wawancara Pribadi, Dusun XXII Pondok Rawa Sampali, 26 November 2019

bagaimana kalau ternyata si pemegang tabungan meminta uang kekurangan dari ibu, apa kekhawatiran ibu kalau ikut tabungan paket lebaran ini. Ia menyampaikan bahwa ia pernah berbelanja di pasar lebih hemat dan juga kualitasnya masih bagus, dan ia mengatakan bahwa si penjual tabungan tidak sampai meminta uang kepadanya hanya saja ia mengetahui dari cerita orang lain si penjual tidak mendapatkan keuntungan.

Selain itu, ia juga mengatakan jikalau diminta uang tambahan ia tidak akan memberinya. Ia juga menyampaikan kekhawatirannya ikut tabungan paket ini, apabila harga pasaran ada yang turun dan akan memberikan keuntungan yang banyak bagi si penjual, karena bisa saja tidak semua bahan paket lebaran harganya naik. Selain itu, ia juga menyampaikan walaupun harga barang naik bisa saja ia memberi kualitas barang yang rendah karna spesifikasi barangnya juga tidak dirincikan.⁵⁶

Adapun menurut ibu Mariati, tabungan paket lebaran ini sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan lebaran. Selain membantu tabungan ini juga tidak memberatkan untuk masalah keuangan. Berdasarkan hasil wawancara tanggal Senin 09 Desember 2019,

⁵⁶ Ibu Yuli, Pembeli, Wawancara Pribadi, Dusun XXII Pondok Rawa Sampali, 30 November 2019

ibu Mariati juga menambahkan bahwa ia juga tidak mengetahui hukum dari tabungan ini.⁵⁷

Berdasarkan wawancara pada hari Senin 09 Desember 2019 dengan ibu Sinta, ia memberitahu bahwa ia tidak menjelaskan secara rinci mengenai barang yang ia paketkan, namun ada beberapa yang ia jelaskan misalnya seperti daging dan sirup. Ia juga mengatakan untuk masalah harga pasti akan mengalami kenaikan setiap tahunnya.⁵⁸

Setelah itu penulis langsung mewawancarai pembeli yaitu ibu Mina, ia mengatakan bahwa alasan untuk ikut tabungan paket lebaran ini agar tidak menyulitkan pada saat lebaran. Ia mengatakan tidak terlalu berat untuk masalah keuangan. Selain itu, ia juga merasa ragu untuk ikut tabungan paket lebaran ini, dikarenakan banyaknya program tabungan paket lebaran ini yang tidak sesuai, misalnya pemegang akan melarikan uang mereka, barang yang diberi kualitasnya rendah. Ia juga menambahkan bahwa tabungan paket lebaran ini seperti judi. Ia mengatakan demikian lantaran harga paket akan naik, barangnya tidak jelas serta pemegang paket juga bisa saja menyalahgunakan uang yang

⁵⁷ Ibu Mariati, Pembeli, Wawancara Pribadi, Dusun XXII Pondok Rawa Sampali, 09 Desember 2019

⁵⁸ Ibu Sinta, Penjual, Wawancara Pribadi, Dusun XXII Pondok Rawa Sampali, 09 Desember 2019

dipegang. Jika pemegang paket tabungan melakukan kecurangan ia pasti akan kehilangan uangnya. Paket tabungan ini hanya bermodal kepercayaan, jadi keraguan itu sudah pasti ada dalam diri ibu Mina.⁵⁹

Pada hari berikutnya penulis mewawancarai ibu Dani pada hari Selasa 10 Desember 2019, ibu Dani merupakan anggota tabungan paket lebaran dan sudah beberapa tahun ia mengikuti tabungan paket lebaran. Ia mengatakan bahwa ia pernah mendapatkan barang yang kualitasnya tidak baik, seperti daging kotakan. Sejak saat itu, ia tidak lagi mengikuti tabungan paket lebaran pada penjual tersebut dan ia beralih ke penjual lain. Namun ia menemukan penjual yang tidak juga menjelaskan secara rinci mengenai barangnya. Setelah tiga tahun ia mengikuti tabungan paket lebaran, ia juga menambahkan ia pernah mendengar penjual mengalami kerugian lantaran harga naik namun tidak sampai diminta kepada para anggota.⁶⁰

Berdasarkan jawaban-jawaban di atas, maka diketahui bahwa tabungan paket lebaran ini di Dusun XXII Pondok Rawa Sampali mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak, baik si penjual

⁵⁹ Ibu Mina, Pembeli, Wawancara Pribadi, Dusun XXII Pondok Rawa Sampali, 09 Desember 2019.

⁶⁰ Ibu Dani, Pembeli, Wawancara Pribadi, Dusun XXII Pondok Rawa Sampali, 10 Desember 2019

maupun si pembeli. Hal demikian dikarenakan fluktuasi harga yang terjadi. Dan masyarakat tidak mengetahui bahwa jual beli dengan harga yang belum pasti merupakan jual beli yang mengandung unsur *gharar* di dalamnya. Selain itu, akad yang digunakan belum sesuai dengan rukun dan syarat serta masih ada beberapa barang yang tidak dijelaskan. Masyarakat juga tidak tahu pasti kategori jual beli yang mengandung unsur *gharar* menurut mazhab Syafi'i.

C. Analisa Penulis

Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan menganalisis jual beli *gharar* perspektif mazhab Syafi'i terhadap pelaksanaan tabungan paket lebaran yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun XXII Pondok Rawa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang berikut ini:

Islam memberikan aturan-aturan yang longgar dalam bidang muamalah, karena bidang tersebut amat dinamis mengalami perkembangan. Meskipun demikian, Islam memberikan ketentuan agar perkembangan di bidang muamalah tersebut tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak. Bidang muamalah berkaitan dengan kehidupan duniawi, namun dalam prakteknya tidak dapat dipisahkan dengan ukhrawi, sehingga dalam ketentuannya mengandung aspek halal, haram, sah, rusak dan batal.

Penulis menganalisis dan memahami bahwa pelaksanaan tabungan paket lebaran belum memenuhi syarat sah dari jual beli. Yang mana syarat sah jual beli harus terhindar dari *gharar*, baik *gharar* pada barang maupun harganya.

Islam melarang semua bentuk transaksi yang mengandung unsur kejahatan dan penipuan. Di mana hak-hak semua pihak yang terlibat dalam sebuah perilaku ekonomi yang tidak dijelaskan secara seksama (terbuka/jelas), akan mengakibatkan sebagian dari pihak yang terlibat menarik keuntungan, akan tetapi dengan merugikan pihak yang lain. Apapun bentuknya, segala aktivitas dalam bidang ekonomi yang tidak dihalalkan dalam Islam adalah suatu perilaku ekonomi yang mengandung unsur yang tidak halal, atau melanggar dan merampas hak kekayaan orang lain.

Hukum yang melarang transaksi tersebut telah ditetapkan dalam al-Qur'an, yaitu Q.S. an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.⁶¹

Perbuatan *gharar* dalam jual beli termasuk perbuatan memakan harta sesama secara batil. Perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang karena tidak mengantarkan manusia pada jalan yang sesuai ajaran Islam.

Kemudian di dalam sebuah hadits juga dijelaskan sah atau tidaknya jual beli serta macam-macam jual beli yang boleh atau tidak boleh. Di antaranya adalah larangan jual beli yang mengandung unsur *gharar*. Sebagaimana ditegaskan dalam hadits berikut ini:

عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر (رواه مسلم)⁶²

“Rasulullah Saw. melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli *gharar* (yang belum jelas harga, barang, waktu, dan tempatnya)” (HR. Muslim)⁶³

Setelah wafatnya Rasulullah saw., muncullah *ijma'* yang digunakan untuk menetapkan hukum syara'. *Ijma'* merupakan kesepakatan para ulama mujtahid dalam menetapkan hukum

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2000), h.65

⁶² Imam al-Hafidz Mahyuddin Abu Zakariyah, *Syarhu an-Nawawi 'Ala Muslim*. (Urdun : Baitu al-Afkar ad-Dauliyah, 2000), h. 963

⁶³ Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugul Maram*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013), h. 322

syara'. Salah satunya kesepakatan para ulama mazhab Syafi'i tentang larangan jual beli *gharar*. *Gharar* yang dimaksud adalah *gharar* baik pada barang maupun harga barang.

Selanjutnya adalah Qiyas, penulis menggunakan qiyas untuk menemukan suatu hukum dengan cara menyamakan nash yang sudah dengan peristiwa yang terjadi. Penulis akan meng-*qiyas*-kan perkataan ulama mazhab Syafi'i tentang *gharar* baik pada barang maupun harganya dengan tabungan paket lebaran.

Pelaksanaan tabungan paket lebaran belum memiliki nash, yang mana tolak ukurnya adalah merek dan juga ukuran barang yang tidak dijelaskan secara rinci serta ketidaksesuaian akad yang digunakan. Hal demikian merupakan bentuk jual beli yang mengandung ketidakpastian ataupun ketidakjelasan.

Dengan demikian, pelaksanaan tabungan paket lebaran di Dusun XXII Pondok Rawa Sampali hukumnya tidak sah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa Hukum Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di Dusun XXII Pondok Rawa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang), adalah:

1. Konsep jual beli pada tabungan paket lebaran menggunakan konsep *bai' Salam*. *Bai' salam* yang dilakukan adalah pemesanan bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan pada saat lebaran, mulai dari beras, telur, minyak, daging sapi, daging ayam, dan lainnya. Pembayaran pada tabungan paket lebaran ini dilakukan secara angsuran setiap minggunya selama 45-48 minggu.
2. Pelaksanaan tabungan paket lebaran yang terjadi di Dusun XXII Pondok Rawa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang adalah jual beli sembako yang sudah di paketkan yang harganya mengalami fluktuasi harga. Apabila harganya naik maka akan merugikan pihak penjual dan apabila harga turun pembeli merasa dirugikan. Cara jual beli yang dilakukan oleh si penjual adalah sudah menetapkan harga paket lebaran tersebut padahal ia belum mengetahui

harga pasti pada saat menjelang lebaran. Masyarakat di Dusun XXII Pondok Rawa Sampali menganggap jual beli ini sudah menjadi adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Akan tetapi, jual beli ini sudah berlangsung cukup lama dan bertentangan dengan hukum Islam dikarenakan mengandung unsur ketidakjelasan atau *gharar*.

3. Hukum jual beli tabungan paket lebaran di Dusun XXII Pondok Rawa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang perspektif Mazhab Syafi'i adalah tidak sah. Ulama Mazhab Syafi'i telah sepakat melarang jual beli *gharar* baik *gharar* pada barang maupun harganya. Hukum jual beli *gharar* ini terdapat pada tabungan paket lebaran, yang mana barang belum dimiliki dan tidak dijelaskan secara keseluruhan barangnya.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat di Dusun XXII Pondok Rawa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang untuk memahami konsep jual beli secara sah.

2. Diharapkan kepada seluruh masyarakat di Dusun XXII Pondok Rawa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan jual beli tabungan paket lebaran yang tidak bertentangan dengan hukum islam dan merugikan salah satu pihak.
3. Diharapkan agar adanya sosialisasi mengenai konsep jual beli yang sah dan jual beli yang dilarang terkait dengan pelaksanaan tabungan paket lebaran sehingga tidak bertentangan dengan hukum islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Taqiyuddin. 1995. *Kifayatul Akhyar*, CV Bina Iman
- Ali Hasan, M. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Pers
- Asdiqo', Mirfaqotul. 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tabungan Lebaran Di Pasar Tersono Batang*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Bin Abdul Aziz, Zainuddin. 1979. *Fathul Mu'in*, alih bahasa Aliy As'ad, Kudus: Menara Kudus
- Departemen Agama RI. 2000. *Al-Quran Dan Terjemahan*, Bandung : CV Diponegoro
- Djuwini, Dimyudin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. 2006. *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab*, Jakarta: Khalifa
- Hajar al-Asqalani, Ibn. 2013. *Bulugul Maram*, Bandung: PT Mizan Pustaka
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah.*, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Isa bin Surah At Tirmidzi, Mohammad. 1992. *Sunan At Tirmidzi*, Juz 3, Beirut: Darul Fikri
- K. Lubis, Suharwadi. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mardani, 2010. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, Jakarta : Prenadamedia Group
- Masduki. 2017. *Fiqh Muamalah Ekonomi dan Bisnis Islam*, Semarang: Rasail Media Group

- Mahyuddin Abu Zakariyah, Imam Al-Hafidz. 2000. *Syarhu an-Nawawi 'Ala Muslim*. Urdun : Baitu al-Afkar ad-Dauliyah
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers
- Al-Muzanni, Imam. 2002. *Mukhtashar al-Muzanni 'Ala al-Umm*, Beirut: Dar al Khatab al-Ilmiyah
- Rahman Ghazaly, Abdul . 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Rasjid, Sulaiman. 2011. *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensido
- Ash- Shabuni, Syaikh Muhammad Ali. 2011. *Shafwatut Tafasir; Tafsir-tafsir Pilihan*, Cet. 1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar
- Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani
- Syahrur, Salim. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media
- Sabiq, Sayyid. 1989. *Fiqih Sunnah XII*, alih bahasa Kamaludin A Marzuki, Bandung: PT Alma'arif
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh al-Sunnah*, jilid III, Beirut: Dar al-Fikr
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers
- Suhendi, Hendi. 2003. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sudiarti, Sri. 2010. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan : FEBI UINSU Press
- Tarmizi, Erwandi. 2019. *Halal Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: PT. Berkas Mulia Insani

Tri Wulansari, Dina. 2018. *Praktik Bagi Hasil Tabungan Idul Fitri Dalam Bentuk Parsel Di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo (Studi Hukum Islam)*, Surabaya: UIN Sunan Ampel

Wardi Muslich, Ahmad. 2019. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah

Zulichah, 2008. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran (Studi Kasus di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal)*, Semarang: IAIN Walisongo

Az-Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqh Imam Syafi’I*, terj. Muhammad Afifi, dkk, Cet. I, Jakarta: Almahira

Az-Zuhaili, Wahbah. 2004. *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, juz V, Beirut : Dar al Fikr

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, jilid 5, Jakarta : Gema Insani

DAFTAR WAWANCARA

A. Daftar Wawancara Terhadap Penjual

1. Sudah berapa lama menjual paket lebaran?
2. Apakah Ibu menjelaskan setiap barang dari isi paket lebaran?
3. Apakah Ibu pernah mengalami kerugian karena fluktuasi harga?
4. Bagaimana cara Ibu mengantisipasi jika terjadi fluktuasi harga?
5. Apakah pernah ada pembeli yang komplain dikarenakan ketidaksesuaian isi paket lebaran?

B. Daftar Wawancara Terhadap Pembeli

1. Sudah berapa kali Ibu ikut paket lebaran ini?
2. Apa alasan Ibu ikut tabungan paket lebaran ini?
3. Apakah Ibu tidak takut mengalami kerugian jika barangnya tidak sesuai?
4. Apakah ada kekhawatiran ibu terhadap penjual jika ia tidak amanah?
5. Apakah Ibu mengetahui hukum dari tabungan paket lebaran?

C. Daftar Wawancara Terhadap Kepala Dusun

1. Sudah berapa lama Bapak menjadi kepala Dusun?
2. Apakah bapak mengetahui kebiasaan masyarakat di Dusun ini tentang tabungan paket lebaran terdapat unsur *gharar*?
3. Bagaimana pendapat bapak tentang tabungan paket lebaran di Dusun XXII Pondok Rawa Sampali?

D. Daftar Wawancara Terhadap Masyarakat

1. Sudah berapa lama ibu tinggal disini?

2. Apakah Ibu mengetahui kebiasaan masyarakat di Dusun ini tentang tabungan paket lebaran terdapat unsur *gharar*?
3. Bagaimana pendapat Ibu tentang tabungan paket lebaran di Dusun XXII Pondok Rawa Sampali?

LAMPIRAN (DOKUMENTASI)





